

Kuasa Hukum Ungkap Biaya Pengobatan David Hampir Rp2 Miliar

JAKARTA (IM) - Mellisa Anggraeni, kuasa hukum David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandy, mengungkapkan biaya pengobatan kliennya selama menjalani perawatan di rumah sakit sampai ia diperbolehkan pulang hampir menyentuh Rp 2 miliar.

“Dua pekan lalu biaya pengobatan baru sekitar Rp 1,2 miliar. Kalau dikalkulasikan sampai sekarang, mungkin sudah menyentuh Rp 2 miliar, tetapi saya belum tahu angka pastinya,” ujar Mellisa, saat ditemui di Rumah Sakit (RS) Mayapada, Minggu (16/4).

Terkait penanggung biaya pengobatan David yang mencapai Rp 2 miliar, Mellisa turut mengungkapkannya. Menurut Mellisa, sejauh ini biaya pengobatan D ditanggung oleh asuransi, keluarga, dan kolega.

“Biaya rumah sakit D ter-cover 80 persen mungkin dari asuransi karena ada beberapa juga yang tidak (ter-cover),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mellisa menegaskan bahwa pihak keluarga David tidak pernah membuka donasi untuk biaya pengobatan.

“Sejauh ini 80 persen dari asuransi, sisanya dari keluarga dan kolega. Tidak ada kita membuka donatur

sampai detik ini, dari keluarga belum,” ujarnya.

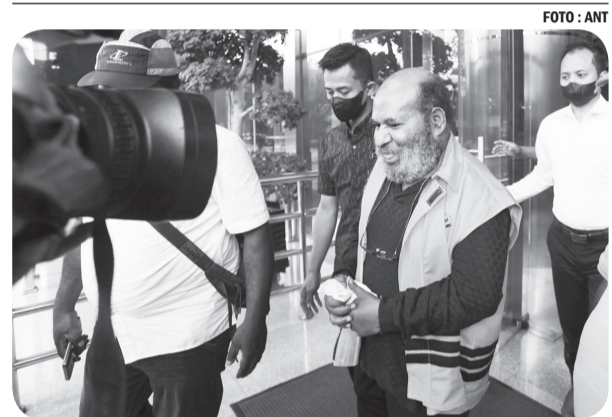
David merupakan korban penganiayaan Mario, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo. Mario menganiaya David pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

David melakukan latihan ketat selama dirawat di Rumah Sakit (RS) Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Ia memiliki jadwal rutin untuk menjalani latihan fisik setiap dua jam.

“Jadi dia itu bisa latihan fisik dua jam sekali. Makanya bisa dilihat dia bisa berjalan dengan kondisi yang cepat,” kata dokter spesialis saraf RS Mayapada, dr Yeremia Tatang Sp.N., di Jakarta, Minggu (16/4).

Yeremia mengaku cukup kaget melihat perkembangan penyembuhan fisik David. Apalagi, korban sebelumnya telah dinyatakan koma selama beberapa hari. Selain itu, kaki David dilaporkan menyusut akibat penganiayaan.

“Makanya bisa dilihat dia bisa berjalan dengan rentang waktu yang cukup cepat. Padahal sebelumnya koma dan otot kedua kaki susut,” kata Yeremia. ● han



PEMERIKSAAN LUKAS ENEMBE

Tersangka kasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di provinsi Papua Lukas Enembe (tengah) berjalan menuju mobil tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/4). Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di provinsi Papua yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10 miliar.

Hakim Disambut Lagu “Indonesia Raya” dalam Sidang Kedua Kasus Fatia-Haris

JAKARTA (IM) - Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (17/4). Sidang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ada yang uni dari jalannya sidang kedua ini. Di mana saat Majelis Hakim memasuki ruang sidang, langsung disambut nyanyian lagu “Indonesia Raya”. Lantunan lagu kebangsaan Indonesia diserukan oleh seorang pria dari barisan bangku sebelah kanan ruang sidang, tepatnya di barisan kedua.

“Hiduplah Indonesia

Raya, “ ujar pria tersebut sesaat setelah Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana muncul.

Mulanya, hanya beberapa orang saja yang turut menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Namun, para hadirin yang berada di dalam ruang sidang langsung mengikuti pria itu dan bernyanyi dengan lantang.

Hakim Ketua sempat menyuruh para hadirin untuk duduk kembali, tetapi tidak dihiraukan. Bahkan, nyanyian semakin kencang. Walhasil, para Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim hanya terdiam membiarkan lagu kebangsaan selesai dinyanyikan. ● mei

AHY Targetkan Kursi DPRD Kota Bekasi Naik 2 Kali Lipat

BEKASI (IM) - Ketua Umum (Ketua) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan, partainya bisa mendapat delapan kursi DPRD Kota Bekasi dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan AHY, sebutan untuk Agus Harimurti, ketika ia berkunjung ke Kota Bekasi dalam safari Ramadannya.

“Sekarang kan empat kursi, kayanya masih kurang kalau itu. Saya punya target, tentunya double up (naik dua kali lipat). Paling tidak, itu yang harus diraih,” ujar AHY di Kota Bekasi, Minggu (16/4).

AHY juga menilai, apabila target delapan kursi dalam pemilu legislatif bisa tercapai, maka Partai Demokrat bisa kembali berkua-

sa di Kota Bekasi. Sebab, Partai Demokrat pernah mencapai 14 kursi di DPRD Kota Bekasi. Apabila target tercapai, maka partainya pun bisa fokus dalam pemilihan calon kepala daerah, baik Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota Bekasi.

“Kalau dapat 10, tentu luar biasa. Dengan demikian, kami bisa mengungsi sendiri pasangan untuk menjadi kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ucap AHY.

Meski begitu, partainya belum mau memikirkan terlalu jauh soal Pilkada di Kota Bekasi dan fokus terhadap pemilu legislatif.

“Karena tahapannya, kami harus yakin kalau di Kota Bekasi ini, kami bisa mendapatkan lebih banyak anggota DPRD,” katanya. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PENGUNGKAPAN PABRIK OLI PALSU

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kanan) bersama petugas kejaksaan melihat langsung oli palsu berbagai merek usai penggerebakan oleh petugas pengawas Kementerian Perdagangan di pabrik pembuatannya di Pinang, Tangerang, Banten, Senin (17/4). Dalam penggerebakan pabrik yang telah beroperasi selama 3 tahun tersebut, petugas menemukan 165.734 botol oli palsu berbagai merek yang siap edar serta 1.153 drum pelumas yang belum dikemas.

Atasi Aksi Separatisme di Papua Pemerintah Perlu Gelar Operasi Militer

Istilah KKB sebaiknya diganti dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) atau Pemberontak Bersenjata, sebab aksi mereka sudah mengancam kedaulatan negara.

JAKARTA (IM) - Terkait kondisi terkini di Papua, TNI disarankan menyelesaikan isu separatisme dengan mekanisme peraturan internasional, sebagaimana diatur oleh PBB. Operasi militer salah satu yang diusulkan.

Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan, separatisme juga terjadi di berbagai belahan dunia dan ditangani secara profesional oleh militer negara-negara tersebut.

Misalnya, isu separatisme di Catalunya diselesaikan dengan cepat dan senyap oleh militer Spanyol. Bahkan

Uni Eropa juga secara tegas membantu pemerintah Spanyol membasmi separatisme Catalunya.

“Dengan status OPM sebagai separatisme, mekanisme dukungan internasional akan berpihak kepada pemerintah Indonesia,” ungkap wanita yang akrab disapa Nuning, Senin (17/4).

Bahkan, Nuning menegaskan, PBB juga akan memberikan dukungan nyata. Ini seperti halnya dukungan kepada pemerintah Inggris terhadap separatisme Irlandia Utara dan kepada pemerintah Spanyol terhadap separatisme Catalunya.

“Komisi HAM PBB juga akan memberikan rekomendasi positif kepada korban prajurit militer yang diserang separatis,” tambah Nuning.

Sebab itu, pemerintah diminta harus berani menentukan bahwa OPM adalah separatisme atau pemberontak bersenjata. Sehingga militer bisa melaksanakan operasi militernya.

“Istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) jangan dipakai lagi karena sudah tidak cocok dengan perkembangan yang ada di mana sudah mengancam kedaulatan negara khususnya wilayah Papua. Sebaiknya pakai saja KST (Kelompok Separatis Teroris) atau Pemberontak Bersenjata,” ungkapnya.

Selama masih disebut kriminal, maka hanya sebatas kejahatan publik, ini rezim persenjataannya juga bukan seperti untuk hadapi kaum separatis.

“Ini masalah cepat tepat

dalam bertindak, kalau tidak kita serang, prajurit kita banyak yang gugur. Dalam hal ini yang diserang KST bukan OAP yang pro NKRI,” kata Nuning.

Wajib Dilumat

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menegaskan, teroris KKB Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens. Dalam peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI tewas. Dave pun mendorong KKB segera ditumpas dari Indonesia.

“Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi pertiwi,” ujar Dave saat dimintai konfirmasi, Senin (17/4).

Menurut Dave, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia (HAM) yang mereka langgar selama ini. Bahkan, kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatisme mereka.

“Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatisme,” tuturnya. ● mar

Enam Hal Membuat Truk Tertahan Berjam-jam di Pelabuhan Ciwandan

CILEGON (IM) - Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 6 masalah yang menyebabkan antrean truk hingga selama 8 jam di Pelabuhan Ciwandan pada Sabtu (15/4) malam.

Salah satu penyebabnya, banyak pengemudi truk hanya ingin menyebarkan ke Pelabuhan Bakauheni, bukan ke Pelabuhan Panjang.

Anggiat Sitorus, pengemudi truk muatan es yang akan mengantarkan barang ke Kota Bukittinggi mengungkapkan, ia sebenarnya terbuka untuk berlabuh di pelabuhan mana saja.

“Saya dialihkan ke mana saja mau. Mau ke (Pelabuhan) Panjang yang penting saya cepet nyabrang dari sini,” katanya kepada wartawan, di Pelabuhan Ciwandan, Senin (17/4).

Dia mengatakan bahwa, ia tertahan di Pelabuhan Ciwandan sejak kemarin malam. Dan hingga siang belum ada kepastian berangkatnya.

Dirinya berharap agar dapat menyebarkan ke Pulau Sumatera dengan segera. Hal

tersebut untuk mengurangi pengeluaran.

“Secepatnya sih nyabrang ke Sumatera, karena terlalu lama di sini biayanya jadi gede,” kata Anggiat.

Pasalnya muatan yang ia bawa memerlukan kondisi AC truk terus menyala, sebab jika tidak menyala kondisi muatannya akan meleleh. Dan itu memerlukan kondisi bahan bakar bbm.

“Selama AC nyala mah aman, yang menting solar keisi,” katanya sambil menjujuk kantong celana.

Dia sudah mengeluarkan biaya lebih dari Rp200 karena molornya jadwal setelah ia tiba di Pelabuhan Ciwandan pada kemarin malam.

“Kita berdua, kalo makan aja sehari nggak cukup Rp100 ribu sehari, belum jajanan kopi nya dan lainnya. Rp200 ribuan lebih lah sudah habis,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiharto mengungkapkan ada 6 penyebab kondisi antrean terjadi di Pelabuhan Ciwandan pada Sabtu malam lalu.

Hendro menjelaskan bahwa antrean tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah truk yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Ciwandan hingga mencapai 60 persen.

“Hari ini kita evaluasi, kita identifikasi yang pertama itu adanya peningkatan pergerakan truk 60 persen, kedua yakni ada 1 kapal yang kurang, ketiga tugboatnya masih kurang,” kata Hendro saat konferensi pers di Kantor ASDP Cabang Merak, Banten, Minggu (16/4).

Kemudian keempat kata Hendro, yakni adanya keinginan para pengguna truk untuk berlabuh di Pelabuhan Bakauheni dibandingkan ke Pelabuhan Panjang sehingga menyebabkan antrean.

“Selanjutnya kelima yakni masih ada yang masuk ke Pelabuhan Ciwandan tapi tidak punya tiket dan keenam screening boarding passnya itu setelah penumpang masuk baru masuk ada screening,” kata Hendro. ● han



PEMERIKSAAN M. GAHMI ARESSA

Tersangka Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau M. Gahmi Aressa (kiri) berjalan ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/4). M. Gahmi Aressa diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan di Kabupaten kepulauan Meranti tahun 2022.

PT. RABANA INVESTINDO					
Gedung Rabana Lt. 6, Jl. Tomang Raya No. 48 A, JAKARTA, 11430					
Telepon: (021) 5669808-10 Faksimili: (021) 5671646					
LAPORAN KEUANGAN					
Untuk Tanggal dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022					
(Dalam Rupiah)					
LAPORAN POSISI KEUANGAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
ASET	LIABILITAS DAN EKUITAS		PENDAPATAN USAHA		
Kas dan Setara Kas	LIABILITAS		Pendapatan Pembiayaan Investasi	387.370.920	
45.860.361.611	Pendapatan Diterima Dimuka	838.504.877	Pendapatan Pembiayaan Modal Kerja	5.363.320.322	
4.547.819.700	Utang Pajak	1.661.461.656	Pendapatan Pembiayaan Multiguna	1.017.600.100	
64.535.795.235	Liabilitas yang Diestimasi	2.183.739.797	Pendapatan Sewa dan Lainnya	2.253.457.611	
10.799.783.512	Liabilitas Lancar Lainnya	702.452.674	Jumlah Pendapatan Usaha	9.021.748.953	
19.007.970.411	JUMLAH LIABILITAS	5.386.159.004			
Aset Tetap - Bersih	EKUITAS		BEBAN USAHA	(5.509.153.247)	
677.862.616	Modal Saham	100.000.000.000	Beban Umum dan Administrasi		
Aset Pajak Tangguhan	Pengukuran Kembali Imbalan Pasakkerja	1.208.251.658			
Aset Lain-lain	Selalih Lebih Revaluasi Aset Tetap	22.907.698	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	9.132.773.484	
31.562.381.187	Labas Bersih Tahun Berjalan	10.557.990.655	Pendapatan (Beban) Lain-lain		
	Tambahan Modal Disetor	12.260.606.004			
	JALDI Laba	47.556.059.253	LABA SEBELUM PAJAK	12.645.369.190	
	JUMLAH EKUITAS	171.605.815.268	PAJAK PENGHASILAN	(1.992.371.483)	
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	176.991.974.272	Manfaat Pajak Tangguhan	(95.007.052)	
			LABA BERSIH	10.557.990.655	
			Pendapatan (Beban) Komprehensif	130.651.808	
			Jumlah Laba Komprehensif	10.688.642.463	
JUMLAH ASET					
176.991.974.272					
Catatan: Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan					
			Jakarta, 18 April 2023		
			S.E.& O		
			Direksi		